



The Effect of Regional Original Income on the Capital Expenditure of the West Aceh Regency Government

Samsidar¹, Rina Maulina,^{1,2} Sari Maulida Vonna¹, Linda Rahmazaniati¹, Ika Rahmadani¹

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 23661, Indonesia

² Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia, Wilayah Aceh, 23114, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: February 23, 2022
Revised: April 26, 2022
Available online: April 28, 2022

KEYWORDS

Regional Original Income, Capital Expenditure, District Government, Regional Financial Management, Budget Realization

CORRESPONDENCE

Rina Maulina
E-mail: rinamaulina@utu.ac.id

A B S T R A C T

This study aims to investigate the impact of local fiscal revenue, the original revenue of the West Aceh District Government, on the capital expenditure of the West Aceh District Government. Data acquisition technology carried out in this study observation, by means of a documentation study, namely looking for the necessary secondary data related to the problems to be discussed using research data in the form of an APBD realization report for 5 periods, namely in the fiscal year 2015-2019 obtained from the Regional Financial Management Agency of West Aceh Regency. The data analysis method used in this research is simple linear regression analysis. Based on the results of the hypothesis test, it can be seen that H_0 is accepted and H_1 is rejected, which means that the regional original income variable has no effect on government capital expenditures in West Aceh Regency. Then in testing the coefficient of determination (R^2), the value of the coefficient of determination (R^2) is 0.455 or 45.5%, which means that the contribution given by the regional original income variable to capital expenditure is 45.5%, while the rest is 54.5% is explained by other variables in other. This study still has limitations as for the limitations in this study, namely using only two variables, namely PAD and capital expenditures and the object of this research is only in Aceh Barat district with a span of 5 years which results in the results of the study not being generalized properly.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 menjelaskan belanja modal merupakan taksiran belanja yang dialokasikan bagi pemerolehan *fixed asset* serta aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan. Menurut Kainde (2013) pengeluaran daerah menentukan jumlah penerimaan di wilayah tersebut. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengeluaran belanja daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah baik di kota maupun kabupaten yang ada di Indonesia.

Menurut Juniawan dan Suryantini (2018) belanja daerah yang merupakan belanja modal layak dipertimbangkan sebab berhubungan langsung dengan keberlanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, serta dalam memahami belanja modal yang berhubungan dengan usaha pemerintah dalam menyuplai sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pemerintah sebagai usaha memberikan *service* yang terbaik untuk masyarakat.

UU Nomor 33/2004 (ps. 1) menjelaskan bahwa penerimaan suatu daerah atau wilayah merupakan kewenangan pemerintah daerah (Pemda) yang di akui seperti sesuatu yang menambah *value* kekayaan bersih selama 1 (satu) rentang waktu anggaran terkait. Lain halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan *income* yang dimiliki oleh suatu daerah yang dikutip dari beberapa sumber sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD bertujuan memberikan hak wewenang dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, PAD merupakan tulang punggung bagi suatu daerah, tingkat penerimaan PAD pun tergantung kepada bagaimana cara PEMDA menelusuri kemampuan yang dimiliki suatu daerah atau wilayah guna untuk memajukan perkembangan serta pembangunan suatu daerah.

Potensi suatu daerah dalam memenuhi pembiayaan publik tidaklah sama dengan daerah lainnya sebab suatu daerah atau wilayah dituntut agar mampu menelusuri potensi atau sumber-

sumber yang dapat menunjang penerimaan PAD, seperti sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang sejak lama sudah menjadi salah satu unsur utama dalam PAD, agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan keluasan dalam pembelanjaan APBD suatu daerah. *Regional tax and levies* merupakan suatu elemen pokok PAD yang diterima secara rutin dan berkepanjangan. Besarnya pendapatan pajak dan retribusi daerah sangat bergantung terhadap kemampuan pengelolaan yang dilakukan pemerintah, maka dari itu pemerintah diharapkan mampu mengasah kemampuan pajak dan retribusi daerah serta mengelola dengan baik sumber keuangan daerah dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut (Rizal, 2019).

Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten yang saat ini sedang berkembang di wilayah barat selatan (barsela), untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik membutuhkan dana yang cukup besar sehingga pemerintah hendaknya dapat meningkatkan PAD agar dapat terciptanya kemandirian suatu daerah. Kebutuhan yang terus meningkat ini harus di iringi dengan adanya peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah (HKD) yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah (Tanjung, 2020).

Penganggaran belanja modal di kabupaten aceh barat masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja daerah, dimana berdasarkan LRA yang diperoleh dari BPKD Aceh Barat menggambarkan bahwa selama ini pemerintah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk belanja operasi yang diantaranya belanja pegawai, belanja bunga, belanja barang dan jasa, belanja subsidi dan lainnya, sementara jika di tinjau dari perkembangan pesat yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat seharusnya pengalokasian ke dalam belanja modal lebih dimaksimalkan karena hal ini akan lebih memberikan manfaat dan lebih produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana pernyataan Sudika dan Budiarta, (2017) menjelaskan bahwa belanja modal sangat produktif jika dilihat dari segi manfaatnya, maka pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik yang akan di berikan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji dan menguraikan secara mendetail terkait pengaruh pendapatan asli daerah dengan belanja modal pemerintah kabupaten aceh barat.

METODE

Dalam studi ini, penulis memakai seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkab Aceh Barat sebagai populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah LRA APBD tahun 2015-2019 yang terdiri dari realisasi PAD dan belanja modal yang diambil dari BPKD Aceh Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari dokumen ringkasan dari LRA dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat yang di peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Ket:

Y = belanja modal

<https://doi.org/10.35308/akbis.v%vi%i.5135>

α = constant

β = koefisien regresi pendapatan asli daerah

X = pendapatan asli daerah

e = standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa pengujian yang dipakai di dalam penelitian ini diantaranya yaitu; pengujian yang terdistribusi secara normal, pengujian *multicollinearity*, dan pengujian heteroskedastisitas. Berikut hasil yang diperoleh dari pengujian masing-masing uji asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Pengujian yang terdistribusi secara normal atau yang biasa kita kenal dengan uji normalitas menggunakan uji kolmogrov-smirnov. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Parameter Normal ^b	Rata-rata	.0007813
	Standar	4074902768610.
	Deviasi	15600000
Perbedaan paling ekstrim	Absolut	.282
	Positif	.166
	Negatif	-.282
Uji Statistik		.282
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Uji distribusi normal
 b. Perhitungan data
 c. Koreksi Signifikansi Lilliefors
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp.sig.2-tailed*) sebesar 0,200. Kerena nilai *significant* lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > \alpha$) dapat dikatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ketidakteragaman pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Hasil yang diperoleh dari pengujian glejser ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Table 2. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Std. Error		
		B	Beta			
1	Konstan	-.37614		138.034	-.272	.803
	Pendapatan Asli Daerah	.497	.964	.285	.515	.642

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa adanya keterkaitan nilai yang berarti (signifikan) pada variabel PAD (X) yakni sebesar 0,642. Hal ini membuktikan bahwa nilai signifikan variabel *independent* dengan *absolute residual* > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi menggunakan metode *durbinwatson*(dW). Hasil pengujian autokorelasi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durb in- Wats on	
1	.455 ^a	.207	46.82480	2.783	

A. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah
 b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Dari hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* dengan ketentuan $du < d < 4-du$. dimana:

- N=5
- D= 2,783
- DL= 0,6102 → untuk N=6
- DU= 1,4002 → untuk N=6
- 4-DL= 4-0,6102= 3,3898
- 4-DU= 4-1,4002= 2,5998

UJI HIPOTESIS

a. Uji T

hasil uji signifikan parameter individual (uji statistik T) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Statistik T

Model	Coefficients ^a				Collinearity Statistic	Tolerance
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		
	B	Std. Error	Beta	Sig.		
1	(Constant)	593,818	370,314	1,604	.207	
1	PAD	2,290	2,585	-.455	.886	1,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai T-hitung sebesar -0,886 dengan signifikansi 0,441 sedangkan nilai T-tabel sebesar 2,131. Karena nilai Thitung < Ttabel atau nilai signifikannya > 0,05, sehingga bisa diartikan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak memiliki dampak terhadap belanja modal.

a) Uji R²

Hasil pengujian terhadap koefisien determinasi pada SPSS, serta diperolehnya hasil output seperti berikut:

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durb in- Wats on
1	.455 ^a	.207	-.057	46.82480	2.783

a. Predictors: (Constant), Pendaptan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan nilai R sebesar 0,455 atau 45,5%. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi yang diberikan variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebesar 45,5%, sedangkan sisanya sebesar 54,5% dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam penelitian ini seperti dana alokasi umum, dana bagi hasil, atau dana alokasi khusus.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal

Dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa PAD (X) memiliki nilai Thitung (-0,865) < Ttabel (2,131) yang menyiratkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, maka hipotesis dalam tinjauan ini ditolak. Kemudian dalam pengujian koefisien determinasi (R²) diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,199 atau 19,9% yang artinya besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebesar 19,9%, serta sisa kelebihan 80,1% disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak ada dalam konsentrat ini seperti DAU, DBH, atau DAK.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran bahwa belanja modal mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015-2017 belanja modal mengalami kenaikan sebesar 36.542.985.267,75, sedangkan di tahun (2018) belanja modal menduduki penurunan sebesar 115.939.041.637. Hal membuktikan bahwa pendapatan asli daerah yang tinggi tidak melihat pengeluaran pemerintah atas belanja modal akan semakin meingkat, karena pendapatan yang diterima juga digunakan untuk belanja lainnya seperti belanja barang dan jasa. Hasil pengujian penelitian ini sesuai dengan peneliti terdahulu yakni Ilma dan Rahayu (2019) yang menyebutkan pendapatan asli daerah tidak berdampak pada belanja modal. Penelitian Ayem&Pratama (2018) juga menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh pada belanja modal. Penelitian Suryani&Pariani (2018) menyatakan tidak memiliki dampak yang berarti antara pendapatan asli daerah pada belanja modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan yang telah dilangsungkan oleh peneliti maka dapat disimpulkan dari hasil uji hipotesis menyatakan H_0 di tolak. Artinya bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak memiliki dampak yang berarti pada belanja modal di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung $-0,865 < T_{tabel} 2,131$ dengan nilai signifikan $0,451 > 0,05$.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yakni hanya menggunakan dua variabel saja diantaranya PAD dan belanja modal serta objek penelitian ini hanya pada kabupaten aceh barat dengan rentang waktu 5 tahun yang mengakibatkan hasil penelitian belum tergeneralisasikan dengan tepat. Maka dengan permasalahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, peneliti ingin mencoba memberi saran atau masukan sebagai berikut:

1. Untuk Pemkab Aceh Barat diminta untuk terus menggali sumber-sumber PAD sehingga dapat memaksimalkan aktivitas pemodalan serta pelayanan publik. Pemerintah juga di harapkan dapat memanfaatkan dan mengalokasikan pendapatan asli daerah dengan baik agar dapat memberikan feedback untuk pendapatan daerah.
2. Bagi penguji berikutnya dimohon untuk bisa meningkatkan sampel, rentang waktu dan dapat menggunakan variabel *independent* yang lebih lengkap dan bervariasi agar hasil penelitian lebih tergeneralisasi. Kemudian peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas objek penelitian misal tingkat provinsi.

REFERENSI

- Juniawan, Made Ari dan Ni Putu Santi Suryantini.(2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali.*Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 3 :1255-1281
- Kainde, Christian. (2013). Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung.*Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 3 : 393-400.
- Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rizal, Anis Syamsu. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, Vol. 7, No. 1 : 88.
- Sudika, I., dan Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 21, No. 2: 1689-1718.

Tanjung, Abdul Hafiz.(2013). Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual, Pendekatan Teknis Sesuai Dengan PP No.71/2010. Bandung:Alfabeta.